

ISSN : 1978-0362

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF



Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF
Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Volume 12, Nomor 2, April 2018

PENGELOLA JURNAL

Ketua Penyunting/Editor-in-Chief:

Achmad Zainal Arifin (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Sekretaris Penyunting/Managing Editor:

Muryanti (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Penyunting Pelaksana/Editors:

Achmad Norma Permata (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Firdaus Wajdi (Universitas Negeri Jakarta)

Napsiah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Yayan Suryana (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Astri Hanjarwati (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Sulistyaningsih (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Rilus A. Kinseng (FEMA Institut Pertanian Bogor)

Sekretariat/Secretary:

Novia Tensiani (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Mitra Bestari/Editorial Board:

Alix Philippon (Sciences Po Aix France)

M. Nur Ichwan (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Zuly Qadir (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Syarifudin Jurdi (UIN Alauddin Makassar)

Gregory Vanderbilt (Eastern Mennonite University United States)

Diterbitkan oleh:

Laboratorium Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Redaksi:

Laboratorium Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto No.1, Yogyakarta

Telp (0274) 51957; Fax. (0274) 519571

Email:

sosiologirefleksif@uin-suka.ac.id dan

sosiologirefleksif@gmail.com

Jurnal Sosiologi Reflektif (JSR) adalah jurnal ilmiah berkala yang memfokuskan diri pada hasil penelitian terkait isu-isu sosial-keagamaan di masyarakat Muslim, khususnya yang berkenaan dengan upaya penguatan civil society dari berbagai aspeknya. Selain itu, JSR juga menerima artikel yang bersumber pada telaah pustaka terkait dengan upaya pengembangan teori-teori sosiologi yang terinspirasi dengan studi keislaman, seperti: pengembangan wacana tentang Ilmu Sosial Profetik, Islam Transformatif, atau pendekatan-pendekatan lainnya.

JSR focuses on disseminating researches on social and religious issues within Muslim community, especially related to issue of strengthening civil society in its various aspects. Besides, JSR also receive an article based on a library research, which aims to develop integrated sociological theories with Islamic studies, such as a discourse on Prophetic Social Science, Transformative Islam, and other perspectives.

JURNAL SOSIOLOGI REFLEKTIF

DAFTAR ISI

THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON INDONESIAN MUSLIM WOMEN'S CONSUMPTION OF ISLAMIC FASHION <i>Durrotul Mas'udah</i>	179
AKTIVISME, FILANTROPI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI YOGYAKARTA : Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta <i>Ahmad Arif Widiyanto</i>	193
RADIKALISASI GERAKAN JAMAAH ANSHARUT TAUHID DAN PENGARUH ISIS DI INDONESIA <i>Asman Abdullah</i>	213
EKSISTENSI <i>PUBLIC SPHERE</i> DALAM MEDIA MAINSTREAM: Studi pada Rubrik <i>Citizen Journalism</i> Tribun Yogyakarta <i>Yanti Dwi Astuti</i>	233
KONFLIK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI DESA SUNGSANG KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN <i>Yunindyawati¹, Evalidya¹, Yusnaini¹, Rohim Pahrozi²</i>	251
PERAN AKTOR DALAM SOSIOLOGI PEMBANGUNAN: Analisis Pergub D.I. Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja <i>Mohammad Wildan Azmi</i>	267

STRATEGI BERJARINGAN RADIO KOMUNITAS ISLAM MADU FM TULUNGAGUNG	
<i>Redi Panuju</i>	289
MASYARAKAT BADUY DALAM PERGULATAN TIGA JARINGAN MAKNA	
<i>Efa Ida Amaliyah</i>	313
TRANSFORMASI KESETARAAN BURUH: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls	
<i>Mohammad Takdir</i>	327
MENETAS JALAN BARU PENGEMBANGAN MASYARAKAT: Sebuah Jawaban di Era Milenium	
<i>Suraji, Muhammad Ali Embi</i>	353
PEMBANGUNAN SEBAGAI KEBEBASAN DAN PENCAPAIAN PERUBAHAN SOSIAL	
<i>Amril Maryolo Ar</i>	367
PERGESERAN NORMA SOSIAL PADA REMAJA DI KOTA TANJUNGPINANG	
<i>Endri Bagus Prastiyo</i>	381
PARTISIPASI KOMUNITAS MUSLIM DESA DALAM USAHA PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI INDONESIA	
<i>Heru Dian</i>	395
LITERATUR KEISLAMAN GENERASI MILENIAL	
<i>Syafuddin Sholeh TS</i>	413

PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum wr. wb.

Jurnal Sosiologi Reflektif Volume 12 Nomor 2, April 2018 ini mengkaji permasalahan sosial yang kompleks dalam perspektif sosiologis. Kajian yang diketengahkan mencakup persoalan konflik nelayan, eksistensi ruang publik dalam media massa, kajian perempuan dan problem masyarakat sehari-hari, termasuk nelayan, organisasi sosial dan keagamaan.

Durrotul menulis tentang *The Impact Of Social Media On Indonesian Muslim Women's Consumption Of Islamic Fashion*. Tulisan ini memaparkan analisis tentang media sosial sebagai sebuah alat konsumsi baru dan pengaruhnya terhadap pola konsumsi fashion Islami oleh wanita Muslim di Indonesia. Hasil analisis menyimpulkan bahwa media sosial, yang dapat dilihat sebagai sebuah alat konsumsi baru, mempengaruhi pola konsumsi fashion Islami oleh wanita Muslim di Indonesia dalam dua cara yang saling berhubungan: (1). media sosial menjadi sebuah ruang konstruksi berbagai macam standar yang dianggap ideal tentang penampilan wanita Muslim yang fashionable dan (2). media sosial mempengaruhi cara-cara wanita Muslim di Indonesia dalam mengkonstruksi dan mempresentasikan identitasnya sebagai wanita Muslim yang fashionable. Kedua hal ini membentuk pola konsumsi mereka terhadap fashion Islami.

Ahmad Arif Widiyanto menulis tentang *Aktivisme, Filantropi Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Di Yogyakarta : Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta*. Penulis menjelaskan artikel ini membahas dinamika aktivisme perempuan Yayasan Sahabat Ibu (YSI) dalam melakukan pemberdayaan perempuan di Yogyakarta. Awalnya YSI terbentuk dari perempuan-perempuan aktivis yang tergerak untuk melakukan *recovery* terhadap anak-anak dan perempuan pasca gempa bumi di Yogyakarta melalui kegiatan filantropis dan motivasi. Aktivisme mereka berlanjut seiring beruntunnya bencana alam di Yogyakarta dari tahun 2006-2012. Para aktivis tersebut kemudian mendeklarasikan diri sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam tulisan ini, Dinamika YSI dibahas dalam tiga poin; *pertama*, potret aktivisme perempuan dan filantropi di Indonesia. *Kedua*, dinamika aktivisme YSI dari karitatif menuju pemberdayaan produktif. *Ketiga*, Upaya YSI untuk melepaskan diri dari ketergantungan bantuan filantropi atau *fundraising* dari lembaga donor melalui pengembangan ekonomi produktif dan pembentukan koperasi simpan pinjam.

Asman Abdullah menulis tentang Radikalisasi Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid dan Pengaruh Isis di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menyorot gerakan Jamaah Anshorut Tauhid. Gerakan JAT merupakan gerakan jihad dengan tujuan memperjuangkan Syariat Islam di Indonesia. Dua hal yang patut disorot dari gerakan JAT *pertama*, keterlibatan JAT dalam pelatihan militer Aceh tahun 2010. Pelatihan militer ini melibatkan lintas *tanzhim* jihad di Indonesia. Alumni dari pelatihan ini kelak membentuk jaringan radikal baru yang berafiliasi dengan ISIS. *Kedua*, pengaruh ISIS di Indonesia melahirkan perpecahan bagi JAT. Bagi jihadi JAT yang mendukung ISIS tetap bertahan dibawah pimpinan Abu Bakar Ba'asyir dan Aman Abdurrahman sedangkan yang menolak bergabung dengan ISIS harus keluar dari *tanzhim*. *Ketiga*, mereka yang keluar dari JAT membentuk jamaah baru dengan nama Jamaah Anshorut Syariah (JAS) dibawah pimpinan Muhammad Achwan.

Yanti Dwi Astuti menulis tentang Eksistensi *Public Sphere* dalam Media Mainstream: Studi pada Rubrik Citizen Journalism Tribun Yogyakarta. Fenomena *Citizen Journalism* menjadi trend dalam dunia jurnalisme dan menjadi ruang publik baru bagi masyarakat. Salah satu media mainstream yaitu koran Tribun Jogja mengadopsi tren tersebut ke dalam rubriknya yang dinamakan rubrik Citizen journalism. Namun dalam prakteknya, terdapat banyak sekali kecenderungan pemberitaan yang tidak sesuai dengan makna hakiki dari *citizen journalism* dan ruang publik itu sendiri. Dimana cenderung sangat datar dan deskriptif tidak menyentuh pada esensi dari makna ruang publik yaitu pada proses diskusi yang megedepankan debat rasional dan kritis serta masih diberlakukannya proses penseleksian dan editing oleh redaktornya. Hal ini sangat kontras dengan semangat hadirnya *citizen journalism* yang bersifat bebas dari intervensi siapapun, menyuarakan pendapat secara leluasa, interaktifitas, tidak terbatas oleh halaman (*unlimited space*), tidak ada persaingan antar penulis, dan tidak adanya penseleksian ketat terhadap konten beritanya.

Yunindyawati, Evalidya, Yusnaini dan Rohim Pahrozi menulis tentang Konflik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Sungsang

Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Dalam masyarakat pesisir, konflik adalah salah satu gejala sosial yang sering kita jumpai di sekitaran daerah mayoritas nelayan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi antara lain konflik karena penggunaan alat tangkap yang merugikan, tumpang tindih lokasi penangkapan, pengrusakan alat tangkap dan kenakalan remaja. Penyelesaian konflik melibatkan berbagai pihak. Jika secara musyawarah mufakat tidak bisa menyelesaikan masalah, maka akan dilanjutkan dengan mediasi oleh pihak pemerintah desa. Langkah selanjutnya yang ditempuh jika mediasi tidak berhasil maka berlanjut ke pihak berwenang seperti dinas terkait dan bahkan kepolisian.

Wildan Azmi menulis tentang Peran Aktor dalam Sosiologi Pembangunan: Analisis Pergub D.I. Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja. Artikel ini menjelaskan peran aktor kebijakan dalam sosiologi pembangunan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. PERGUB D.I. Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja adalah upaya pemerintah sebagai aktor dalam meningkatkan pelayanan publik melalui sektor transportasi publik (Bus Trans Jogja). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan bukan sekedar dari sektor ekonomi dan politik saja, melainkan sektor sosial juga memiliki peran penting dalam pembangunan mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian aktor kebijakan dalam sosiologi pembangunan dari sektor transportasi publik (Bus Trans Jogja) memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Redi Panuju menulis tentang Strategi Berjaringan Radio Komunitas Islam Madu Fm Tulungagung. Fenomena radio komunitas Madu FM sangat menarik untuk diteliti karena merupakan stasiun radio komunitas yang berhasil tumbuh di tengah penyiaran kontestasi. Radio komunitas mendapat pembatasan pembatasan (pembatasan) negara melalui Undang-Undang Penyiaran (UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran). Selain itu, radio komunitas masih harus bersaing dengan radio swasta dan televisi swasta. Madu FM mampu beradaptasi dengan keadaan tanpa melanggar peraturan. Hasilnya adalah strategi penyiaran radio komunitas berhasil berinovasi inovasi sehingga menjadi ada. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Penelitian dilakukan selama periode dari bulan Maret sampai Agustus 2016.

Efa Ida Amaliyah menulis tentang Masyarakat Baduy dalam

Pergulatan Tiga Jaringan Makna. Tujuan tulisan ini mengeksplorasi tentang tiga jaringan makna yang menjadi teori Bernard Adeney-Risakotta, yaitu agama, modernitas, dan budaya nenek moyang pada masyarakat Baduy yang mempunyai pola sedikit berbeda. karena ada dua Baduy, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Luar sudah terpengaruh pada modernitas, yaitu teknologi (televise dan transportasi), institusi dan gagasan (ide). Tidak ada konfrontasi dari luar Baduy, karena mengedepankan kebersamaan dan saling menghormati. Baduy Luar masih memegang teguh budaya nenek moyang dengan patuh pada puun sebagai kepala suku. Mereka tetap memakai identitas sebagai masyarakat Baduy, yaitu pakaian yang merupakan ciri khas Baduy. Baduy Dalam dalam menerima tiga jaringan di atas. Baduy Dalam merupakan masyarakat yang menonjolkan budaya nenek moyang.

Mohammad Takdir menulis tentang Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls. Artikel ini bertujuan untuk mengubah paradigma tentang buruh yang selalu dipandang sebagai sekelompok masyarakat yang terbelakang dan tertindas. Dalam memandang relasi buruh dan majikan, sebagian orang seringkali menggunakan paradigma perbudakan daripada paradigma kemanusiaan (*humanitarian paradigm*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam sebuah struktur sosial masyarakat lebih diakibatkan oleh hilangnya rasa empati yang mendalam terkait dengan argumen kesetaraan (*equality*) sebagai kata kunci dalam konsepsi keadilan. Rawls menawarkan konsep tentang *justice as fairness* yang harus menjadi pijakan utama dalam memperjuangkan kesetaraan buruh dalam berbagai aspek, terutama menyangkut pemenuhan hak, kewajiban dan kesejahteraan hidup.

Suraji, Muhammad Ali Embi menulis tentang Menetas Jalan Baru Pengembangan Masyarakat: Sebuah Jawaban di Era Mellineum. Pengembangan masyarakat proses bergerak ke arah suatu tahap atau kondisi di mana masyarakat menjadi semakin kompeten terhadap permasalahan dan kondisi komunitas maupun lingkungannya. Kompetensi masyarakat yang semakin meningkat ini diharapkan dapat menimbulkan aktivitas pembangunan atas prakarsa masyarakat (komunitas) sendiri. Pengembangan masyarakat juga sebagai gerakan, yang berusaha melakukan reformasi terhadap kondisi yang dianggap kurang menguntungkan. Dalam konteks saat ini tentu pengembangan masyarakat (community development) didasarkan pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan masyarakat lokal menuju kemajuan dan

kesempurnaan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di era globalisasi. Kajian yang relevan dalam community development adalah kajian pengembangan masyarakat yang sejalan dengan peran lembaga Perguruan Tinggi yaitu memfungsikan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Amril Maryolo menulis tentang Pembangunan Sebagai Kebebasan dan Pencapaian Perubahan Sosial. Kajian sosial memiliki macam variasi karena masyarakat bukanlah objek yang tunggal. Perubahan sosial merupakan fenomena konstruksi masyarakat yang memiliki ragam yang bervariasi. Pembangunan merupakan suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, sosial, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu “pembangunan” disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”. Bersamaan dengan teori pembangunan terdapat teori-teori perubahan sosial lainnya seperti sosialisme, dependensia, ataupun teori lain.

Endri Bagus Prastiyo menulis tentang Pergeseran Norma Sosial Pada Remaja di Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini sedang berkembang, namun memiliki berbagai masalah terkait dengan pergeseran nilai yang terjadi pada generasi mudanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran norma sosial dikalangan remaja Kota Tanjungpinang dimana mereka telah banyak melakukan pelanggaran norma sosial yang ada di masyarakat, mulai dari adanya remaja yang mengkosumsi minuman berakohol, menggunakan narkoba, bahkan melakukan seks bebas. Perilaku ini terjadi karna ada faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran norma itu terjadi, yaitu faktor secara internal dan eksternal, internal berasal dari dalam diri remaja itu sendiri, sementara eksternal merupakan faktor yang didapat dari luar diri remaja.

Heru Dian menulis tentang Partisipasi Komunitas Muslim Desa dalam Usaha Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. Terbentuknya BUMDes sebagaimana tertuang dalam UU No.6/2014 belum sepenuhnya mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan, karena hanya sekitar 9,09% desa yang dinilai mampu merealisasikan program BUMDes, bahkan dari jumlah prosentase tersebut hanya terdapat sekitar 21,68% BUMDes yang dinilai menguntungkan. Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pembangunan program BUMDes. Satu faktor paling penting adalah kurangnya pengembangan modal sosial di pedesaan.

Demikian kajian Jurnal Sosiologi Reflektif Edisi 12 Nomor 2. Semoga artikel yang penulis sajikan memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Wallahu a'lam bi showab

Wassalamualaikum wr.wb

**JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF**



MENETAS JALAN BARU PENGEMBANGAN MASYARAKAT: Sebuah Jawaban di Era Milenium

Suraji¹, Muhammad Ali Embi²

¹Ghazali Shafie Graduate School of Government

²Universiti Utara Malaysia

Alamat Email: surajimunawir@gmail.com
ali@uum.edu.my

Abstract

Community development is a process of directing people toward a stage or condition which society becomes more competent to problems and conditions of the community and environment. The increasing competence of community members is expected to generate development activities based on their own initiative. In the current context, community development are most in based on religious and cultural values, including local wisdom, in order to overver come various problems within society. Relevant studies of community development should in line with higher educatin institutions throught the implementation of "Tridharma PT", which consist of : education, research and service. Moreover, within this milleneal era, community development has significant influence on education, politics, economics, social, as well as on culture.

Keywords : Community, Development, Local Wisdom and Millenium

Intisari

Pengembangan masyarakat proses bergerak ke arah suatu tahap atau kondisi di mana masyarakat menjadi semakin kompeten terhadap permasalahan dan kondisi komunitas maupun lingkungannya. Kompetensi masyarakat yang semakin meningkat ini diharapkan dapat menimbulkan aktivitas pembangunan atas prakarsa masyarakat (komunitas) sendiri. Pengembangan masyarakat juga sebagai gerakan, yang berusaha melakukan reformasi terhadap kondisi yang dianggap kurang menguntungkan. Dalam konteks

saat ini tentu pengembangan masyarakat (community development) didasarkan pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan masyarakat lokal menuju kemajuan dan kesempurnaan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di era globalisasi. Kajian yang relevan dalam community development adalah kajian pengembangan masyarakat yang sejalan dengan peran lembaga Perguruan Tinggi yaitu memfungsikan Tri Darma Perguruan Tinggi yang terdiri pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Orientasi tersebut tentu menjadi harapan apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Faktor lain, spesifikasi keilmuan sebagai basis intelektual dan keahlian pengembangan masyarakat mendapat tempat penting dan strategis di era millenium saat ini baik dari segi pendidikan, politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Kata Kunci: Pengembangan Masyarakat-Kearifan Lokal-Millennium

Pendahuluan

Era millenium dan era kebebasan beragama telah mejalar di masyarakat. Isu agama, politik, kekerasan, radikalisasi, teroris dan lebih-lebih pelecehan agama sudah menjadi informasi yang sering muncul di media, sehingga pemerintah, institusi agama (ormas), masyarakat seakan-akan dibuat bingung. Dalam fakta yang lain ustad/kyai, tokoh masyarakat, elit politik yang menjadi panutan sudah melakukan perselingkuhan politik bahkan secara langsung terjun di politik praktis, sehingga umat kehilangan arah karena tokoh panutan telah berpindah orientasi dari jangka pendek yang mendapat porsi material ketimbang orentasi jangka panjang yang membawa kebahagiaan dan kearifan. Ormas agama sudah tidak menjadi bagian dari *civil society* tetapi cenderung menjadi kekuatan elit, bahkan corong penguasa yang kurang peduli terhadap kemiskinan, kebodohan dan pengangguran.

Di sisi lain inisiatif pengembangan masyarakat berasal, bersumber, dan disusun serta direncanakan dari luar masyarakat atau dari pemerintah pusat. Dalam menyusun dan merencanakan kurang memperhatikan prakarsa, potensi kebutuhan dan inisiatif lokal. Tidak mengherankan bila inisiatif masyarakat sulit untuk berkembang, sehingga dalam berbagai hal masyarakat lokal amat tergantung pada kekuatan dan kekuasaan luar dan pemerintah pusat. Oleh karena itu,

dalam melaksanakan program-program pengembangan masyarakat partisipasi komunitas lokal rendah karena mereka tidak tahu apa tujuan dari suatu program. Dalam kondisi demikian kelanjutan setiap program sangat rapuh karena sikap memiliki dan rasa tanggung jawab untuk meneruskan apa yang telah dilakukan tidak muncul. Sikap ini sangat kurang menguntungkan dalam mencapai pengembangan masyarakat yang diharapkan.

Mempertimbangkan kelemahan itu muncul pendekatan baru dalam pengembangan masyarakat yang menekankan pada upaya memperkuat kemampuan masyarakat lokal dengan menumbuhkan partisipasi, inisiatif dan kepemimpinan masyarakat lokal. Untuk mencapai itu memberdayakan masyarakat dan memperkuat institusi lokal sangat diperlukan. Sehingga pemberdayaan tidak hanya menyangkut aspek politik, sosial, ekonomi, tetapi yang lebih penting juga pemberdayaan nilai-nilai agama dan masyarakat lokal (kearifan lokal/lokal genius). Prinsip pemberdayaan adalah memberi kewenangan dan otoritas pada masyarakat lokal untuk merencanakan dan menentukan pilihan-pilihan dan secara aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemanfaatan hasil.

Dalam kancah permasalahan tersebut dibutuhkan ijtihad dan gerakan baru untuk menjadikan masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek pemberdayaan yang di komando oleh pionir-pionir baru yang memahami ilmu, teori, dalil-dalil, serta didukung oleh wahana budaya pesantren, berpengalaman yang matang dalam keorganisasian dan secara langsung terjun di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan pemberdayaan dan pendampingan secara masif. Dalam konteks tersebut orientasi pengembangan masyarakat perlu mendapat perhatian dan dipelajari sebagai bagian ilmu penting di era saat ini dan masa-masa mendatang. Tulisan ini mencoba menganalisis pengembangan masyarakat di lingkungan perguruan tinggi sebagai jawaban di era globalisasi dan milenium saat ini.

Community Development: Sejarah, Konsep dan Realita

Salah satu cara memahami pengertian suatu konsep adalah melalui definisinya. Sehubungan dengan hal tersebut, *community development* ternyata mempunyai banyak definisi, bahkan dapat dikatakan sangat banyak. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan tulisan Hayden yang menyajikan sejumlah definisi yang berbeda dan berlaku di berbagai negara.¹ Ia menyajikan definisi *community*

1 Robert Hayden, *Community Development Learning and Action*, (Toronto

development yang berlaku di Inggris, Amerika Serikat, Kanada, India, Rhodesia dan juga definisi yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dapat terjadi dalam suatu negara ditampilkan lebih dari satu definisi. Sebagai contoh dapat dikutipkan definisi yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. *Community Development* adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional. Definisi tersebut, juga definisi lain yang senada, pada umumnya mendapat kritik paling tidak dalam hal adanya unsur patronase yang terkandung di dalamnya. Penilaian semacam itu muncul karena dalam definisi tersebut terkesan adanya orientasi yang lebih mengarah pada kepentingan masyarakat makro dibandingkan kepentingan komunitas. Di samping itu juga dirasakan hubungan antara komunitas dengan otoritas pemerintah (dan juga badan-badan pembangunan non pemerintah) bersifat vertikal. Seolah-olah otoritas di luar komunitas yang lebih memiliki sumber daya, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan skill, sehingga berposisi sebagai pihak pemberi sedangkan komunitas sebagai pihak penerima.

Kesan akan adanya hubungan vertikal antara badan-badan pembangunan pemerintah dan non pemerintah dengan komunitas yang akan dibangun juga semakin menguat dari adanya anggapan bahwa strategi *community development* diperuntukkan bagi usaha membantu pengembangan masyarakat yang masih terbelakang bahkan primitif. Melalui pemikiran seperti itu, kemudian dianggap ada jarak dalam tingkat peradaban antara komunitas yang hendak dibantu dengan badan-badan pembangunan dari luar komunitas. Dalam hal ini, pihak dari luar komunitas yang lebih maju peradabannya akan membantu masyarakat untuk mempercepat proses perubahan dan pembaruan guna mengejar ketinggalan.

Dalam tinjauan ilmuwan politik, pengertian *community development* seperti itu juga mudah menimbulkan kekhawatiran bahwa strategi *community development* dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat penetrasi negara (melalui berbagai lembaga dan instansi yang mempunyai program pembangunan sampai pada level komunitas) terhadap masyarakat. Dalam konteks hubungan antara negara dengan masyarakat, *community development* mengandung

dua proses yang berjalan serentak namun kontradiktif yaitu proses memasukkan desa ke dalam negara dan proses memasukkan negara ke dalam desa². Penetrasi negara ke desa (komunitas) akan semakin menguat apabila proses kedua yang lebih dominan. Kekhawatiran dari tinjauan ilmu politik tersebut akan lebih memperoleh dasarnya apabila digunakan untuk memahami pelaksanaan *community development* yang dilancarkan oleh pemerintah kolonial di daerah jajahannya.

Sebagai bahan perbandingan dapat ditampilkan definisi yang dirumuskan Christenson dan Robinson.³ Dengan terlebih dahulu memaparkan sejumlah definisi yang sudah ada, mereka kemudian mendefinisikan *community development* sebagai suatu proses di mana masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural dan atau lingkungan mereka. Dari rumusan tersebut terlihat kesan bahwa definisi Christenson dan Robinson hendak menyatakan bahwa dalam *community development* intervensi bukanlah merupakan hal yang mutlak, justru yang lebih penting adalah prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam proses yang berlangsung. Walaupun terkesan adanya beberapa variasi dalam definisi yang ada dengan masing-masing memberikan penekanan pada aspek yang berbeda, tetapi dapat ditarik beberapa prinsip umum yang selalu muncul. Prinsip-prinsip tersebut adalah (1) fokus perhatian ditujukan pada komunitas sebagai suatu kebulatan (2) berorientasi pada kebutuhan dan permasalahan komunitas (3) mengutamakan prakarsa, partisipasi dan swadaya masyarakat.

Dipandang dari terminologi yang digunakan, konsep *community development* juga sering dikatakan mengandung potensi kontradiksi. Hal ini disebabkan karena dalam konsep *community* terkandung tiga elemen penting yaitu lokalitas (*local ecology*), kehidupan sosial yang terorganisasi dan solidaritas sosial. Di lain pihak, dalam konsep *development* terkandung unsur perubahan kondisi sosial ekonomi. Unsur-unsur yang terkandung dalam kedua konsep tersebut dapat berjalan seiring dan saling mendukung, tetapi dapat juga sebaliknya. Sebagai contoh hubungan yang tidak saling mendukung adalah, perubahan kehidupan ekonomi dalam

2 Sumarjono, *Pembangaunan Masyarakat Desa*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangaunan Masyarakat Desa, 1994), hlm. 24

3 Christenson, James, dan Robinson, Jery, *Community Development in Perspective*, (Ames: Iowa State University Pres, 1989), hlm. 14

suatu masyarakat dapat mengakibatkan melemahnya solidaritas sosial. Menanggapi permasalahan tersebut para pengembangnya mengatakan bahwa strategi *community development* justru ingin mengintegrasikan dan mensinergikan unsur-unsur dari dua konsep tersebut, yang sekaligus merupakan ciri khasnya. Dengan kata lain dapat dijelaskan, bahwa dalam *community development* terkandung pembangunan ekonomi sekaligus pembangunan manusia dan relasi sosialnya dalam posisi saling mendukung. Pembangunan ekonomi tanpa pembangunan aspek manusianya tidak dapat disebut sebagai *community development*.⁴ Penjelasan yang senada juga dapat dijumpai dalam uraian Sanders (1958) dalam rangka menjelaskan hubungan sekaligus perbedaan antara *community development* dan *community organization*, Ia mengurai konsep *community development* dengan menggunakan analogi nama orang barat yang pada umumnya mengandung *first name* dan *surname*. Dalam hal ini *community* sebagai *first name* dan *development* sebagai *surname*. *Community* sebagai *first name* sebetulnya yang dimaksud adalah *community organization* yang di dalamnya memberikan penekanan pada partisipasi masyarakat dan perencanaan sosial, sedangkan *development* sebagai *surname* yang dimaksudkan adalah *economic development* yang mengandung unsur peningkatan produktivitas dan efisiensi, distribusi sumber daya dan perbaikan kondisi ekonomi. Dengan demikian, *community development* adalah *community organization* yang mengandung unsur pembangunan ekonomi atau *community development* adalah pembangunan ekonomi yang juga mempunyai watak sosial atau watak sebagai pembangunan manusia.

Dengan demikian melalui *community development* sebagai proses untuk meningkatkan kondisi kehidupan yang memberikan fokus perhatian pada komunitas sebagai suatu kesatuan kehidupan bermasyarakat, guna merealisasikan tujuan tersebut cenderung lebih mengandalkan pada pemanfaatan dan pendayagunaan energi yang ada dalam kehidupan komunitas itu sendiri.

Dalam penggunaannya di Indonesia, konsep *community development* juga diterjemahkan ke dalam beberapa istilah yang berbeda. Sementara pihak menerjemahkan *community development* sebagai pembangunan masyarakat. Dilihat dari terjemahan unsur kata-katanya barangkali tidak salah, walaupun demikian dalam penggunaannya sebagai konsep yang bulat mungkin dapat mendatangkan dualisme pengertian. Sebagaimana diketahui,

⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

pengertian pembangunan masyarakat dapat dipandang dari sudut arti luas dan dapat pula dari sudut arti sempit (Ndraha,1987:72).⁵ Dalam arti luas, pembangunan masyarakat berarti perubahan sosial berencana baik dalam bidang ekonomi, teknologi, sosial maupun politik. Pembangunan masyarakat dalam arti luas juga dapat berarti proses pembangunan yang lebih memberikan fokus perhatian pada aspek manusia dan masyarakatnya. Dalam arti sempit, pembangunan masyarakat berarti perubahan sosial berencana pada suatu lokalitas tertentu. Dilihat dari pelaksanaannya sampai saat ini, *community development* lebih condong merupakan pengertian yang ke dua. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa *community development* merupakan salah satu pelaksanaan atau strategi dari pembangunan masyarakat dalam pengertian luas, Oleh karena itu, untuk menghindari kerancuan dengan pengertian pembangunan masyarakat dalam arti luas, *community development* oleh sementara pihak tidak diterjemahkan sebagai pembangunan masyarakat, tetapi dengan istilah pembangunan komunitas atau pengembangan komunitas.

Sehingga konsep *community development* dapat dilihat sebagai suatu proses, karena aktivitas *community development* tersebut bergerak dari suatu tahap atau kondisi tertentu ke tahap atau kondisi berikutnya. *Community development* proses bergerak ke arah suatu tahap atau kondisi di mana masyarakat menjadi semakin kompeten terhadap permasalahan dan kondisi komunitas maupun lingkungannya. Kompetensi masyarakat yang semakin meningkat ini diharapkan dapat menimbulkan aktivitas pembangunan atas prakarsa masyarakat (komunitas) sendiri. *Community development* juga sebagai gerakan, yang berusaha melakukan reformasi terhadap kondisi yang dianggap kurang menguntungkan. Dalam konteks saat ini tentu *community development* didasarkan pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan masyarakat lokal menuju kemajuan dan kesempurnaan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di era globalisasi.

Community Development : Sebagai Kebutuhan

Perkembangan *community development* dapat dilihat dalam kedudukannya sebagai suatu disiplin atau mata kajian ilmu pengetahuan dan dapat pula dilihat dalam kedudukannya sebagai

⁵ Ndraha, Talizuduhu, *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, (Jakarta: Bina Aksara,1987), hlm. 72

sebuah strategi dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat. Sebagai sebuah disiplin, perkembangan *community development* di Amerika Serikat dimulai dari karya Biddle di Earlham College Richmond Indiana pada tahun 1947 (Christenson and Robinson, 1989: 18).⁶ Dalam perkembangannya kemudian, lebih dari 80 universitas dan *college* menawarkan *courses* tentang *community development*, dan beberapa di antaranya mempunyai program master di bidang ini. Sebagai media pengembangan disiplin sekaligus sarana tukar-menukar informasi di antara peminat kajian ini, di Amerika Serikat sempat berdiri suatu himpunan peminat *community development*. Di samping itu, ternyata *community development* juga banyak dikembangkan di berbagai negara di luar Amerika, terbukti adanya beberapa universitas yang menerbitkan jurnal tentang *community development ini*, di antaranya penerbitan Oxford University Press.

Selain Biddle, penulis lain yang cukup berpengaruh pada awal perkembangan disiplin ini adalah TR Batten. Banyak tulisannya yang diterbitkan pada periode 1950-an dan 1960-an. Pada umumnya, perhatian Batten lebih banyak dicurahkan pada teknik *community development*, terutama tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip *community development* dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh sebab itulah pemikiran-pemikirannya banyak digunakan dalam berbagai pelatihan bagi para petugas lapangan. Salah satu di antara buku-buku karangan Batten tersebut yang berjudul *Community and Their Development* sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Surjadi dengan judul *Pembangunan Masyarakat Desa*.

Community Development sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan juga dikemukakan dalam laporan Richard W. Poston, berjudul *Report of the Chairman, Division of Community Development* (Ndraha, 1987:79).⁷ Laporan tersebut mendefinisikan *community development* sebagai suatu sistem pengetahuan (*body of knowledge*) yang mempelajari komunitas sebagai suatu kebulatan dan berbagai aspek serta hingsi kehidupannya yang merupakan bagian dari kebulatan tersebut. Sebagai suatu sistem pengetahuan, dari disiplin *community development* ini memang diharapkan lahir berbagai teori atau setidaknya proposisi yang merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip dasarnya. Teori dan proposisi tersebut dapat digunakan

⁶ Christenson dan Robinson, *Community Development in Perpsective*, hlm.18.

⁷ Ndraha, *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, hlm.72.

sebagai referensi untuk, memahami bahkan melakukan prediksi tentang berbagai fenomena sosial dan kecenderungan yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat. Di samping itu, teori dan proposisi tersebut juga dapat digunakan sebagai pedoman operasional pelaksanaan *community development* di lapangan. Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian, teori dan proposisi dalam bidang *community development* akan sangat bermanfaat sebagai landasan pencarian informasi serta petunjuk dalam mencari keterkaitan antarfenomena dalam rangka pengembangan kajian *community development* itu sendiri.

Dalam kenyataannya, pengembangan teori dalam *community development* paling tidak menghadapi dua masalah pokok. *Pertama*, tidak dapat disangkal bahwa teori dan proposisi dalam *community development* sering kali harus diturunkan atau merupakan derivasi dari teori yang lebih bersifat makro. Dengan demikian dibutuhkan kejelasan hubungan antara konsep-konsep *community development* dengan konsep-konsep dalam teori yang lebih makro tersebut, seperti perubahan sosial dan konsep pembangunan pada umumnya. *Kedua*, teori dan proposisi memang dapat dibangun dari abstraksi dan generalisasi kasus-kasus empirik. Dalam kenyataannya, hal ini pun bukan cara yang mudah dan sederhana, karena berbagai pengalaman pelaksanaan *community development* tersebut pada umumnya berasal dari sejumlah komunitas kecil yang sangat bervariasi.

Sebagai suatu strategi pembangunan masyarakat, di negara-negara sedang berkembang *community development* sudah mulai dilaksanakan sejak negara-negara tersebut masih berada dalam masa penjajahan. Sudah barang tentu hal ini juga lebih banyak merupakan perluasan dari pe-nerapan *community development* yang sudah dilakukan dalam masyarakat negara penjajahnya. Sebuah sumber mengatakan, bahwa istilah *community development* sudah digunakan oleh kantor yang mengurus daerah koloni Inggris sejak tahun 1948. Konperensi tentang pemerintahan Afrika member! batasan untuk istilah tersebut sebagai suatu gerakan yang dirancang guna memajukan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh komunitas dengan partisipasi aktif yang jika mungkin atas prakarsa masyarakat, tetapi jika prakarsa itu tidak datang secara spontan, digunakan teknik untuk merangsang dan membangkitkannya dengan maksud mendorong tanggapan aktif dan antusias terhadap gerakan itu.⁸

⁸ Mac Pherson, Stewart, *Kebijaksanaan Sosial di Dunia Ke-tiga*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987), hlm. 226

Lebih lanjut, selama tahun-tahun 1950-an, *community development* dilaksanakan secara meluas baik oleh pemerintah jajahan Inggris, Perserikatan Bangsa-Bangsa, maupun pemerintah di sejumlah negara sedang berkembang. Pokok-pokok pikiran tentang *community development* tersebut kemudian secara garis besar termuat am dokumen PBB yang dirumuskan tahun 1955. Konsep tersebut kemudian semakin memasyarakat secara internasional yang pada umumnya mengandung beberapa prinsip yaitu: (1) mempersatukan usaha dari rakyat untuk rakyat dengan usaha pemerintah; (2) memajukan usaha ekonomi, sosial dan kebudayaan; (3) mengintegrasikan komunitas dengan masyarakat nasional. Dilihat sebagai suatu proses perubahan dan pembaruan, dua unsur yang dianggap paling hakiki dan diharapkan saling mendukung dalam *community development* adalah partisipasi masyarakat dalam memperbaiki taraf hidupnya sedapat mungkin berdasarkan prakarsa sendiri dan pelayanan teknis atau bentuk pelayanan lain untuk mendorong prakarsa dan partisipasi.

Melihat prinsip-prinsip yang terkandung dalam *community development* tersebut, tidak mengherankan apabila di saat-saat awal kemerdekaannya banyak negara-negara sedang berkembang yang tertarik untuk menggunakan strategi ini dalam pelaksanaan pembangunannya. Salah satu faktor yang mendukung ketertarikan tersebut adalah adanya prinsip swadaya atau *self help* yang terkandung dalam strategi *community development*. Prinsip tersebut sejalan dengan kecenderungan dan iklim yang sedang melanda negara-negara yang baru saja lepas dari cengkeraman penjajah. Dalam kondisi yang demikian, adalah wajar apabila semangat kemandirian dan kebebasan sedang singgah di hati masyarakat dan para pemimpin bangsa, sebagai ungkapan pembuktian bahwa sebagai bangsa mampu untuk mengelola negara sendiri. Guna melaksanakan strategi ini ada sejumlah negara sedang berkembang yang menerapkannya secara selekrif di beberapa komunitas terpilih, biasanya dalam bentuk pilot proyek, tetapi ada pula sejumlah negara lain yang menerapkannya secara nasional. Di samping itu dilihat dari pihak yang menyelenggarakan, *community development* dapat dilaksanakan baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Tinjauan Islam dalam *Community Development*

Dalam mengkaji Pengembangan Masyarakat Islam tidak dapat terlepas dari sejarah Islam itu sendiri yakni Nabi Muhammad SAW sebagai awal pembawa Agama Islam. Nabi Muhammad

SAW sendiri yang memberi teladan kepada umat manusia ke arah pembentukan masyarakat berperadaban. Setelah belasan tahun berjuang di berjuang di Kota Makkah tanpa hasil yang terlalu menggembirakan, Allah memberinya petunjuk untuk hijrah ke Yatsrib, kota *Wahah* atau *oas* sebelah utara Makkah. Sesampai di Yatsrib, setelah perjalanan yang amat melelahkan dan penuh kerahasiaan, beliau disambut para sahabat dengan menyanyikan syair *Thala 'al badru 'alayn* (Bulan purnama telah menyingsing di atas kita), untaian syair dan lagu yang kelak terkenal di seluruh dunia. Kemudian, setelah mapan dalam kota hijra nama Yatsrib menjadi *al-Madinah*, artinya 'kota', yang dilengkapkan menjadi *Madinatun Naby* (kota nabi).⁹

Secara konvensional perkataan '*madinah*' memang diartikan sebagai kota. Tetapi secara ilmu kebahasaan, perkataan itu mengandung makna peradaban. Dalam bahasa Arab yang artinya 'peradaban' memang dinyatakan dalam kata-kata '*madaniyyah*' atau '*tamaddun*', selain dalam kata-kata '*hadlarah*'. Karena itu tindakan Nabi mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah pada hakikatnya adalah niat, atau proklamasi, bahwa beliau bersama para pendukung atas kaum Muhajirin dan kaum Anshar hendak mendirikan masyarakat beradab. Tidak lama setelah menetap di Madinah itulah Nabi meletakkan dasar-dasar masyarakat madani, dengan bersama Madinah menggariskan ketentuan hidup bersama dalam suatu sebagai Piagam Madinah (*Milsaqal Madinah*). Dalam dokumen itulah umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan, antara lain kepada wawasan terutama di bidang agama dan ekonomi, serta tanggung jawab khususnya pertahanan, secara bersama. Dan di Madinah itu pula. Sebagai pembelaan kepada masyarakat madani, Nabi dan kaum beriman diizinkan perang membela diri menghadapi musuh-musuh peradaban.

Dalam membangun masyarakat yang berperadaban Rasulullah, selama sepuluh tahun di Madinah. Beliau membangun masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, dengan landasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-Nya. Taqwa kepada Allah dalam arti semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam peristilahan kitab suci juga disebut semangat *rabbaniyyah* atau *ribbiyyah*. Inilah *habluminallah* tali hubungan dengan Allah, dimensi vertikal hidup manusia, salah satu jaminan untuk manusia agar tidak jatuh hina dan nista. Semangat *rabbaniyyah* atau *ribbiyyah* itu, jika cukup tulus dan sejati, akan memancar

⁹ Nurcholish Madjid, *Beragama di Abad Dua Satu: Sebuah Kumpulan Esai Peradaban*, (Bandung: Zikrul Hakim, 1997), hlm.1-4

dalam semangat perikemanusiaan, yaitu semangat *insaniya atau basyariyah*, dimensi horizontal hidup manusia, *hablun minannas*. Kemudian semangat perikemanusiaan itu sendiri memancar dalam berba pergaulan sesama manusia yang penuh budi luhur.

Dalam konteks yang lain, peradaban sebagai pengembangan masyarakat yang di lakukan Rasulullah adalah membangun masyarakat madani, '*civil society*'. Masyarakat madani menurut Robert N. Bellah, seorang ahli sosiologi agama terkemuka, disebut sebagai masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern, bahkan terlalu modern, sehingga Nabi sendiri wafat, tidak bertahan lama. Timu Tengah dan umat manusia saat itu belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial yang modern seperti dirintis Nabi. Menurut Nurcholish Madjid (1997) masyarakat madani warisan Nabi saw. yang bercirikan anata lain egalitarisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan berdasarkan keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain), keterbukaan masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan.

Sedangkan dalam konteks pesantren kajian Pengembangan Masyarakat Islam tidak dapat dilepaskan dari kyai dan pesantren itu sendiri yang lahir jauh sebelum lahirnya NKRI. Dalam *setting* sejarah perjuangan merebut kemerdekaan dan menghadapi ancaman pergolakan di dalam negeri seperti pemberontakan PKI, kiai selalu menempatkan negara pada posisi penting yang wajib dibela dan dipertahankan. Kehadiran kiai dalam setiap perubahan di Indonesia, menurut Dhofier menunjukkan bahwa kiai yang terikat dengan pola pemikiran Islam tradisional mampu membenahi diri untuk tetap memiliki peranan dalam membangun masa depan bangsa dan negara. Kiai juga berhasil memperbaharui penafsiran tentang Islam tradisional sesuai dengan kebutuhan situasi modern. Bahkan keberhasilan modernisasi pemikiran kiai tersebut perubahannya tidak kalah modern dibandingkan dengan kelompok sosial politik lain yang sejak awal menyatakan diri sebagai organisasi modern.¹⁰

Sebagai bukti bahwa kyai sebagai tokoh penggerak pengembangan masyarakat adalah hampir semua kyai mempunyai lembaga pesantren sebagai lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal serta posisi kyai sebagai pengabdian masyarakat yang di perankan atas dasar perjuangan dan kecintaan terhadap umatnya. Gelora dunia pesantren yang cukup lama membuktikan keberadaan

¹⁰ Zamakksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982)

pesantren mempunyai kekayaan intensitas sosial yang tidak dimiliki oleh pendidikan modern sampai saat ini. Nilai-nilai kekayaan pesantren sebagai media pengabdian masyarakat telah membuktikan keberhasilan kyai dan pesantren dalam pengembangan masyarakat. Menurut Zamakhsyari Dhofier (1982) kekayaan pesantren dalam pengembangan masyarakat telah diwujudkan pada konsep semangat hubungan Khaliq dan manusia (*habluninallah wahabluminannas*), integritas social yang berkesinambungan, kesungguhan dan semangat pengabdian, ketokohan dan keahlian, kearifan dan ketawadhuaan, ketauladanan dan kerendahan. Dari pendapat tersebut muara yang dibangun dalam pengembangan masyarakat dalam kekayaan nilai budaya pesantren adalah memadukan nilai-nilai yang ada dengan kontekstualisasi modern yang mampu memberikan jawaban permasalahan masyarakat di era globalisasi. Dalam arti tidak cukup dengan ilmu, teori, pengalaman, tetapi ketauladanan dalam setiap bentuk aktivitas sehari-hari (ilmu bil amal).

Secara umum gagasan Islam dan pesantren dalam pengembangan masyarakat, nilai-nilai yang dibangun sejak masa Rasulullah SAW. hingga saat ini mempunyai relevansi tekstual dan kontekstual yang sama yaitu masyarakat madani menuju Ridlo Allah SWT.

Penutup

Sudah menjadi keharusan bagi lembaga Perguruan Tinggi untuk memfungsikan Tri Darma Perguruan Tinggi yang terdiri pendidikan, penelitian dan pengabdian. Orientasi tersebut tentu menjadi harapan apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Faktor lain, spesifikasi keilmuan sebagai basis intelektual dan keahlian khususnya pengembangan masyarakat mendapat tempat penting dan strategis di era globalisasi dan melineum saat ini baik dari segi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Bahkan dibidang agama perlu menggerakkan semangat pengabdian di masyarakat. Sehingga kebutuhan akan dalil, teori, dan pengalaman menjadi sangat penting dalam pengembangan masyarakat (tidak sekedar berdalil atau berteori), tetapi bukti nyata keterlibatan langsung di masyarakat. Dalam hal ini teori barat, dalil serta nilai-nilai islam dan pesantren perlu diterjemahkan dan orientasikan kembali dalam konsep yang unggul, sehingga dapat menjawab persoalan umat. Hal ini secara otomatis mendasarkan pentingnya generasi baru yang menjadi pionir-pionir di tengah-tengah masyarakat yang berbasiskan pada akademis, aktivis dan agamis.

Daftar Bacaan

- Achmad Siddiq, 1992, *Khittah Nahdliyyah*, Balai Buku, Surabaya.
- Amrullah Achmad, 1985, *Dakwah Islam dan Transformasi Sosial-Budaya*, PLP2M, Jakarta.
- Christenson, James, dan Robinson, Jerry, 1989, *Community Development in Perspective*, Iowa State University Pres, Ames.
- David Jary, 1991, *Collins Dictionary of Sociology*, Harper Collins Publisher, London.
- Hayden, Robert, 1979, *Community Development Learning and Action*, University of Toronto Pres, Toronto Landon.
- Soetomo, 2006, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sumarjono, 1994, *Pembangaunan Masyarakat Desa*, Sekolah Tinggi Pembangaunan Masyarakat Desa, Yogyakarta.
- Suraji, 2010, *Rangkuman Studi Islam Progresif*, Pustaka Fahima, Yogyakarta
- Suraji, 2011, *Demokrasi dan Birokrasi Sebuah Dilema Politik*, Total Media, Yogyakarta.
- Ndraha, Talizuduhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mac Pherson, Stewart, 1987, *Kebijaksanaan Sosial di Dunia Ke-tiga*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta
- Nurcholish Madjid, 1997, *Beragama di Abad Dua Satu: Sebuah Kumpulan Esai Peradaban*, Penerbit Zikrul Hakim, Bandung.
- Zamakksyari Dhofier, 1982, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta, LP3ES.